

Belanja Modal- Legislator Dorong Pembangunan Irigasi dan Jalan di Kabupaten Jeneponto



Sumber gambar:

<https://emedia.dpr.go.id/2024/05/14/legislator-dorong-pembangunan-irigasi-dan-jalan-di-kabupaten-jeneponto/>

Komisi V DPR RI menerima audiensi DPRD Kabupaten Jeneponto terkait koordinasi dan konsultasi pengusulan jalan dan pemeliharaan saluran irigasi Kelara-Karalloe, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menerangkan, terkait buruknya kondisi irigasi yang bersumber dari Sungai Kelara, pihaknya akan segera bersurat kepada kementerian terkait agar segera membantu pembangunan irigasi sesegera mungkin, mengingat pentingnya fungsi irigasi tersebut bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

”Yang jadi masalah sekarang ini adalah irigasi yang bersumber dari Sungai Kelara di sana. Itu sumber penghidupan rakyat. Air di sana dari situ bobol. Makanya rakyat di sana bergotong royong. Balai pompengan di sana tidak mampu berbuat apa-apa. Makanya kita *take over*. Saya suruh buat surat untuk segera dikirim ke Jakarta untuk membantu pembangunan sesegera mungkin,” kata Hamka saat ditemui usai audiensi di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Selain itu, Hamka juga menyoroti belum maksimalnya fungsi peraisran Bendungan Karaloe. Bendungan yang telah memakan biaya lebih dari Rp800 miliar ini dinilai belum memiliki efek yang signifikan bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

”Sementara ini kita coba melihat, akan saya bicarakan dengan Menteri PUPR dari sisi mananya karena masih banyak perbaikan-perbaikan di sana,” kata Legislator Dapil Sulawesi Selatan I ini.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Hamka menambahkan, dari segi infrastruktur pihaknya berfokus pada dua hal di Kabupaten Jeneponto, yakni masalah irigasi dan masalah jalanan. Menurutnya, dua hal ini menjadi titik tolak untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Jeneponto, khususnya bagi masyarakat.

"Tapi tentu dari kementerian PUPR tentu punya alasan-alasan tersendiri sehingga kenapa daerah saya masih kecil (anggarannya), bantuannya ke situ, mungkin ada alasan-alasan teknis, ini yang akan saya luruskan dengan baik, supaya apapun itu menjadi skala prioritas dari dapil saya, khusus Kabupaten Jeneponto," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto Khaidir Adi Saputra berharap bantuan terkait masalah irigasi dan jalan segera hadir di wilayahnya, mengingat keduanya sangat dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Jeneponto.

"Sehingga harapan kami kepada bapak yang terhormat, untuk bagaimana bisa mendorong terhadap penganggaran-penganggaran yang ada di balai untuk sesegera mungkin dikerjakan secara darurat dulu. Terkait dengan penanganan permanennya, tadi Pak Hamka sudah menyampaikan bahwa sudah lengkap perencanaan dan sebagainya, dan kami sangat berharap yang sangat besar agar pembangunan khusus untuk irigasi ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga saja paling lambat tahun depan sudah bisa direalisasi," pungkasnya. •we/aha

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://emedia.dpr.go.id/2024/05/14/legislator-dorong-pembangunan-irigasi-dan-jalan-di-kabupaten-jenepono/>
2. <https://sulse.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

